

WORKSHOP CIVIC TECH
15 Juni 2023, Pukul 13.30 WIB
Hotel Oria, Jakarta & Zoom Meeting

Usep Hasan Sadikin

Workshop ini merupakan program dan kegiatan yang didukung oleh Respect USAID yang bertujuan menciptakan demokrasi di Asia Pasific yang lebih baik, khususnya di bidang teknologi kepemiluan.

Telah hadir offline:

1. Eko Anggoro (IFES) akan menjelaskan capaian, perbedaan, dan rekomendasi teknologi kepemiluan yang selama ini dilakukan oleh KPU
2. Diah Setiawaty (API Pemilu yang disupport Asia Foundation, aktif di Viamo) akan menjelaskan teknologi Pemilu 2014 dan jejaring komunitas data digital dan developer di pemilu.
3. Anwar Natari (Satu Dunia) akan menjelaskan pemantauan pemilu 2014 dan 2019 berbasis teknologi

Online

1. Ismail Fahmi (Drone Emprit) akan menjelaskan evaluasi digital Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 serta pilkada, khususnya di media social Twitter.
2. Ainun Najib (Kawal Pemilu) akan menjelaskan evaluasi teknologi repitulasi suara Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan rekomendasi Pemilu 2024

Eko Anggoro (IFES)

Memaparkan: Peluang Kolaborasi dalam Ekosistem Teknologi Pemilihan Umum

Teknologi pemilu

1. Latar belakang
2. Tantangan dan peluang
3. Peluang kolaborasi
4. Penutup

Pemilu dan Inovasi Teknologi

- Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi yang memiliki tantangan kompleks untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan efisien.
- Dalam era digital dan informasi yang terus berkembang, teknologi memiliki peran yang krusial dalam mengatasi tantangan tersebut.
- Pemanfaatan inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan proses pemilihan umum, menjaga keamanan, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi pemilih.

Peran Teknologi

- Meningkatkan akurasi dan efisiensi
- Mempermudah diseminasi informasi pemilu dan pendidikan pemilih
- Meningkatkan transparansi, mencegah kecurangan pemilu dan penyebaran informasi palsu
- Bagi penyelenggara pemilu, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan integritasnya.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

- Ketersediaan Data Pemilu: Data pemilu yang disediakan oleh penyelenggara pemilu tidak tersedia atau tidak lengkap, struktur tidak konsisten, format tidak memudahkan untuk analisa lebih lanjut oleh publik
- Keterbatasan Infrastruktur: Kendala pemerataan infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas dan keadilan dalam pemilihan umum.
- Keamanan siber: Keamanan adalah isu krusial dalam ekosistem teknologi pemilihan umum karena dapat mengganggu/merusak integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan.
- Penyebaran informasi palsu: Penyebaran informasi palsu dapat mempengaruhi persepsi publik, memicu konflik, dan merusak proses pemilihan umum yang adil. Memerangi penyebaran informasi palsu membutuhkan solusi teknologi yang efektif.
- Pengawasan dan transparansi: Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam pemilihan umum, masih terdapat tantangan dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk pemantauan penghitungan suara dan pelaporan hasil.

Peluang

- Adopsi Inovasi Teknologi Digital Baru: adopsi teknologi digital terkini, seperti sistem elektronik penghitungan suara, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi dan kecepatan dalam proses pemilihan umum.
- Analisis Data Pemilihan: analisis data pemilihan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola pemilih, preferensi pemilih, dan tren sosial yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
- Penggunaan Teknologi Mobile: Dalam lingkungan digital yang semakin berkembang, teknologi mobile dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi pemilihan yang mudah diakses, memberikan notifikasi pemilihan kepada pemilih, serta memfasilitasi pelaporan pemilihan secara real-time.
- Pemantauan real-time: Teknologi pemantauan real-time, seperti penggunaan kamera di TPS, serta aplikasi pelaporan langsung oleh saksi pemilihan, dapat meningkatkan transparansi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kecurangan secara cepat.
- Kolaborasi dengan Komunitas Teknologi: kolaborasi antara lembaga pemilihan, pemerintah, dan komunitas teknologi dalam analisis dan diseminasi data kepiluan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi teknologi dalam pemilihan umum.

Peluang Kolaborasi

- Pengembangan Platform Terbuka untuk Mendukung Transparansi Pemilu

Pengembangan platform terbuka untuk berbagi data pemilu yang relevan mampu meningkatkan transparansi pemilu. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi kepiluan, melakukan analisis lanjutan yang lebih baik, dan berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilu.

- Akses terbuka: daftar pemilih, lokasi TPS, hasil pemilu, informasi calon dan partai politik dapat diakses dengan mudah oleh publik.
- Penggunaan Data Terstruktur: adopsi standar data terstruktur memungkinkan informasi pemilu disajikan secara konsisten, mudah dipahami, dan dapat dianalisa lebih lanjut.
- Visualisasi Data: data pemilu divisualisasikan agar mudah diinterpretasikan dan dipahami oleh masyarakat (Grafik, diagram, peta, dan infografis).
- Kerja Kolaborasi: mendorong masyarakat, peneliti, dan komunitas teknologi untuk berkolaborasi dalam menganalisis dan memvalidasi data pemilu.
- Mendorong Partisipasi Masyarakat: keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pemilu.

- Pengembangan Platform Interaktif untuk Pendidikan Pemilih

Pengembangan platform interaktif untuk pendidikan pemilih dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Kemudahan akses dan penyampaian informasi terkait proses pemilu, calon dan informasi lainnya secara interaktif akan mendorong partisipasi aktif pemilih dan memperkuat demokrasi.

- Metode Interaktif: menggunakan pendekatan menarik dan mudah dipahami bagi pemilih untuk mempelajari proses pemilu, hak-hak pemilih, dan peran mereka dalam sistem demokrasi. → Video, gambar, quiz, dan konten interaktif lainnya yang meningkatkan keterlibatan pemilih.
- Transparansi Informasi: memberikan informasi yang transparan terkait tentang calon, partai politik, dan isu-isu yang sedang diperdebatkan dalam pemilu. Dengan menyediakan informasi yang obyektif dan akurat, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
- Kampanye Pendidikan: pemanfaatan sebagai alat kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Kampanye tersebut dapat mencakup informasi tentang tanggal dan lokasi pemilihan, prosedur pemungutan suara, dan pentingnya suara setiap individu.

- Forum Teknologi Pemilu antara Stakeholder Pemilu, Komunitas Teknologi, dan Masyarakat Sipil
Merintis forum kolaborasi teknologi pemilu berpotensi mewujudkan kemitraan yang kuat antara masyarakat sipil, komunitas teknologi, stakeholder pemilu.

- Berbagi Pengetahuan: memungkinkan masing-masing pihak untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Melalui pertukaran informasi ini, kedua belah pihak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang di bidang teknologi pemilihan umum.

- Membangun Jaringan Kerjasama: menciptakan kesempatan untuk membangun kerjasama antara masyarakat sipil, komunitas teknologi dan stakeholder pemilu. Melalui interaksi dan diskusi yang intensif, mereka dapat saling mengenal, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang kuat untuk bekerja sama dalam meningkatkan proses pemilu.
- Bertukar Pengalaman: memungkinkan saling berbagi pengalaman dalam menerapkan solusi teknologi terutama dalam pemilu. Dengan mendengarkan pengalaman tentang keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh pihak lain, masing-masing pihak dapat belajar satu sama lain dan memperbaiki proses kepemiluan.
- Diskusi Terkait Tantangan dan Inovasi: menyediakan ruang diskusi terkait tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi pemilu dan juga inovasi yang mungkin diterapkan. Diskusi ini dapat melibatkan perencanaan strategis, kebutuhan ketersediaan data, pengembangan solusi baru, dan identifikasi kebutuhan teknologi yang belum terpenuhi.
- Mendorong Kerja Kolaborasi: Melalui forum ini, ide-ide kerja kolaborasi dapat muncul. Para peserta dapat saling berbagi rencana kerja, mengidentifikasi kesamaan kepentingan, dan menggabungkan sumber daya mereka dalam sebuah proyek kolaborasi. Hal ini dapat menghasilkan solusi teknologi yang inovatif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan proses pemilu.

Apa selanjutnya?

Masyarakat sipil dan komunitas teknologi memiliki peran penting atas pemilu yang akurat dan kredibel. Yang dapat dilakukan:

1. Analisis dan Verifikasi Data: analisa dan verifikasi data pemilu yang disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk identifikasi pola, anomali, dan potensi ketidakwajaran, sehingga memastikan keakuratan dan integritas data.
2. Pengembangan Solusi Teknologi: mengembangkan solusi teknologi inovatif untuk mengatasi tantangan pemilu seperti kecurangan pemilih, disinformasi, dan kurangnya transparansi.
3. Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas: mempromosikan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui platform data terbuka data pemilu dan berbagi temuan kepada publik.
4. Mengadvokasikan Perbaikan Pemilu: dengan pendekatan berbasis data, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan memberikan rekomendasi perbaikan

Ainun Najib (Kawal Pemilu)

Sepakat tantangan adalah ketersediaan data, apakah KPU akan tetap open data dan transparan.

Seandainya tidak ada open data dari KPU, bagaimana? Akan sangat memberatkan, misalnya ketersediaan scan formulir C1. Paling minimal struktur dan daftar TPS, kode TPS, lokasinya. Daerah pemekaran masih belum diupdate.

Problem yang belum terpecahkan: menjaga pileg daerah, MK tetap memutuskan proporsional terbuka, sehingga masih bisa memilih kandidat, waspada jual beli suara antar kandidat dalam 1 partai.

Perlunya Regenerasi Kawal Pemilu untuk menjaga kesinambungan Kawal Pemilu.

Usep Hasan Sadikin

Data TPS dikaitkan dengan format Sirekap berdasarkan Pilkada 2020, tapi gagal karena server tidak kuat.

Ainun Najib (Kawal Pemilu)

- Rumor kendala teknis dan non teknis, porsi di IT KPU yang memecahkannya. Kalau KPU perlu bantuan dari Komunitas Teknologi, semoga diantisipasi sejak awal.
- Porsi offline menjadi scan pdf diperbanyak, meski ongkos operasional lebih besar.
- Tidak setuju dengan e-voting, belum siap mempercayai lembaga yang menyelenggarakan e-voting.

Ismail Fahmi (Drone Emprit)

Memaparkan Kolaborasi Monitoring dan Pelaporan Pelanggaran dalam Pemilu 2024.

- Potensi Kecurangan dalam Tahapan Pemilu, misalnya Oktober 2023 – Februari 2024 tahapan Kampanye, kalau sekarang ada kampanye di awal, biasanya ditolak Bawaslu, tidak bisa dianggap pelanggaran.
- Elon Musk: Sunlight is the best disinfectant.
- Kecurangan harus dibuat viral.
- Rencana Drone Emprit:
 1. Analisis media sosial dan online untuk berbagai isu terkait Pilpres 2024 (sebelum, saat dan pasca)
 2. Kurasi informasi pelanggaran yang diberitakan di media online dan media sosial, yang dikombinasikan dengan informasi pelanggaran dari lapangan.
- Dashboard laporan pelanggaran sedang dibuat bersumber dari laporan lapangan dan laporan media. Kalau ada kecurangan misal alat peraga, money politic, bisa dilaporkan, diupload gambarnya. Dashboard bisa diakses publik.

Diah Setiawaty

Memaparkan: Civic Tech Ecosystem

Civic Tech is the use of technology that enables greater participation in government or otherwise assists government in delivering citizen services and strengthening ties with the public.

Civic tech bisa berjalan dengan baik, terkait dengan ketersediaan data-data pemilu.

Data considered open in Indonesia Election:

- Legal frame work
- Administration
- Proses
- Daerah pemilihan

- Kualifikasi surat suara
- Pendidikan pemilih
- Kampanye pemilu

Data considered partialy open:

- pendaftaran parpol,
- campaign finance,
- voter registration,
- voter list,
- polling station,
- electoral complaints and disputes,
- election campaign

Data considered not open in Indonesia Election: election security and election results.

Jenis civic tech dalam pemilu:

- Open data
- Pendidikan pemilih
- Hasil pemilu
- Pemantauan pemilu

Civic Tech Challenges:

1. Electoral regulation and political environment
2. Social media echo chambers
3. Hyperpartisanship
4. Populism
5. Degrade, spread hatred, harassment, bullying
6. Digital divide
7. Artificial Intelligence.

AI adalah tantangan tersendiri, meskipun dapat dimanfaatkan misalnya penggunaan AI untuk pendaftaran pemilih dan verifikasi di Estonia dengan menggunakan pengenalan wajah, Chatbot AI bisa membantu pendidikan pemilih.

Critical elements for successful civic tech in election (World Bank, 2015):

1. Champion from leadership/ political commitment from government
2. Leadership and political commitment;
3. Policy or legal framework;
4. Institutional structures, responsibilities, and capabilities
5. Data availability
6. Civic engagement and capabilities
7. Resources (financial, human resources, etc).

Ekosistem civic tech harus terus dijaga. Pemilu adalah even yang sifatnya musiman 5 tahun sekali.

3 Syarat untuk membuat civic tech sukses:

1. Perlu adanya champion di pemerintah untuk membantu melakukan perubahan dari dalam
2. Open data/data terbuka yang bisa diolah kembali oleh masyarakat atau komunitas civic tech
3. Partisipasi dan kolaborasi dari segenap lapisan masyarakat.

Anwar Natari (Satu Dunia)

Satu Dunia menambahkan dari aspek konten. Kerja pemantauan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. 2014 saya berkeliling ke 5 kota yang menjadi ibukota provinsi untuk bertemu Bawaslu. Isunya sama, tentang SDM.

Idealnya kerja Bawaslu akan menjadi efektif jika mem-follow up laporan dari masyarakat, karena keterbatasan SDM.

Kata kunci kolaborasi menghindarkan kita kerja dari nol lagi apa yang sudah dilakukan dan terjadi improvement.

2014 Satu Dunia melakukan pemantauan terhadap kemunculan iklan partai.

Bagaimana cara publik melaporkan hoaks. Satu Dunia mendorong anak muda melek politik dan mengawasi pelanggaran pemilu.

AI merupakan tantangan berikutnya, karena di level bawah masih belum tahu deep fake. Bagaimana mendeteksi video AI yang menyebarkan hoaks. Sampai sekarang banyak inisiatif masyarakat sipil dan media masa untuk mengecek fakta.

2019 Satu dunia memantau topik kampanye, kebanyakan parpol menikmati kebohongan yang ada di luar sana. Kalau ada hoaks yang menimpa Anis, lawannya Anis yang mengklarifikasi agar masyarakat percaya.

Usep Hasan Sadikin

- Penerapan Kode Etik untuk peserta pemilu.
- Volunteer pemantau pemilu

Anwar Natari (Satu Dunia)

Ada kekhawatiran terhadap UU ITE ketika melaporkan fakta, dianggap melakukan pencemaran nama. Partisipasi publik jangan dikriminalisasi dengan UU ITE.

Perlu meliterasi publik mengenai keamanan dalam melaporkan fakta.

Fadli Ramadhani

2014 Perludem kolaborasi dengan Mata Massa dan Satu Dunia isu iklan Capres.

Diperlukan tools pemantauan pemilu.

Tantangan dari 2014 dan 2019 dan sekarang tidak banyak berubah, bagaimana mengkonsolidasi masyarakat dan publik menggunakan tools ini untuk melaporkan pelanggaran ke Bawaslu. Sekalipun terhubung dengan kanal pelaporan Bawaslu, seringkali laporan yang masuk tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Kolaborasi Perludem dengan Climate Hub membuat konten pendidikan politik, membuat obrolan dengan anak muda.

Perludem sedang membuat peta pelanggaran pemilu. Tantangan: bagaimana memobilisasi masyarakat, SDM untuk verifikasi, bagaimana melaporkan kepada Bawaslu.

Usep Hasan Sadikin

Ada kebutuhan komitmen yang lebih luas/antarpihak.

Ismail Fahmi (Drone Emprit)

Harus ada proses pelatihan untuk memastikan laporan mengikuti kaidah hukum.

Kecurangan menjadi narasi yang kita bangun. Ada laporan pelanggaran yang harus terus menerus dimonitor.

Anwar Natari (Satu Dunia)

Untuk di daerah perlu memperhatikan adanya masa kadaluarsa pelaporan. Satu Dunia setiap minggu mengirimkan laporan ke Bawaslu, tetapi ternyata tidak ada SDM untuk menindaklanjuti. Perlu amplikasi di media massa dan media sosial terhadap adanya kecurangan. Pilihan kata penting sekali dalam laporan.

Usep Hasan Sadikin

Anggota KPU berbeda-beda penyikapannya dalam reformasi teknologi pemilu.

Di verifikasi parpol kita tidak mendapatkan data dari KPU. Sikap penyelenggara pemilu yang tidak kooperatif apa yang harus dilakukan?

Eko Anggoro (IFES)

Keterbukaan data itu meredup, yang bisa dilakukan oleh kita, masyarakat sipil dan komunitas teknologi, adalah memperluas jaringan kita dengan lembaga yang memiliki concern yang sama, memetakan

kebutuhan, perlu ada data tandingan, jika data yang dibutuhkan tidak disediakan. Advokasi kita ke penyelenggara pemilu juga perlu diteruskan.

Usep Hasan Sadikin

Kalau kita bisa mengumpulkan komunitas teknologi, apakah bisa dihubungkan ke KPU?

Diah Setiawaty

Kita melakukan digitalisasi data, event hacketon agar penyelenggara pemilu bisa melihat inisiasi dari anak muda ini. Ada posisi tawar yang cukup tinggi dari komunitas teknologi.

Usep Hasan Sadikin

Bagaimana sikap sekretariat KPU terhadap ketersediaan data pemilu?

Eko Anggoro (IFES)

Lembaga penyelenggara pemilu terikat pada SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Perlu ada kesamaan pemahaman Pusdatin terkait peraturan data pribadi dan UU ITE, agar ketika mereka membuka data tidak salah.

Ahmad M. Vauzi

Civic tech perlu peran publik, sebegus apapun tools yang dipakai, jika tidak ada peran publik akan kurang. Bagaimana untuk mencegah partisipasi publik dimainkan oleh para calon atau partai politik?

Ismail Fahmi (Drone Emprit)

Dari 2 atau 3 kubu akan mencoba memanipulasi. Yang bisa kita lakukan, kita mencoba analisis, membangun literasi publik dengan data. Publik perlu diedukasi.

Laporan-laporan yang valid secara hukum dapat dipakai di MK. Kalau bisa dilakukan ramai-ramai akan sangat bagus.

Analisis laporan kecurangan perlu real time. Laporan diberikan kepada netizen untuk kemudian disebarkan oleh media.

Anwar Natari (Satu Dunia)

Membuat Pemilu bersih pakai aplikasi dan website agar anak-anak muda melaporkan kecurangan.

-oOo-

Workshop Civic Tech
“Perumusan Strategi dan Rencana Aksi Keterbukaan Data Pemilu”
20 September 2022, Pukul 12.00 WIB
Hotel Century Park, Jakarta

Amalia Salabi

Workshop ini hybrid, ada beberapa partisipan yang hadir secara daring dan offline.

Khoirunnisa Nur Agustyati

Perludem menginisiasi keterbukaan data pemilu menjelang Pemilu 2014. Kami sangat mengapresiasi KPU juga memiliki perhatian terhadap keterbukaan data. Ada peningkatan partisipasi publik dengan KPU membuka data-datanya.

Menjelang Pemilu 2024 diharapkan KPU meneruskan apa yang telah diinisiasi oleh KPU sebelumnya.

Hari ini akan mendiskusikan perumusan strategi dan rencana aksi keterbukaan data pemilu.

Maharddhika

Perludem terlibat dalam advokasi keterbukaan data pemilu sejak Pemilu 2014. Sekretariat Open Government Indonesia sedang menjangir usulan Rencana Aksi Nasional (Renaksi) 2023-2024 dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah. Menjelang Pemilu 2024, kami mencoba menyeleraskan strategi untuk 2024.




Zoom Meeting You are viewing Dika's screen View Options

Workshop Keterbukaan Data Pemilu

Home Tools Workshop Kaberb... Sign In

10 / 18 02:3% Share

Talking: Perudem - Jakarta Sel...



Tujuan Workshop

- Mendiskusikan kondisi terkini ekosistem civic tech dan keterbukaan data pemilu
- Mendiskusikan dan menyusun strategi dan usulan rencana aksi tata kelola keterbukaan data pemilu menuju Pemilu dan Pilkada 2024

Unmute Start Video Participants (10) Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Zoom Meeting You are viewing Dika's screen View Options

Workshop Keterbukaan Data Pemilu

Home Tools Workshop Kaberb... Sign In

3 / 18 02:3% Share

Talking: Perudem - Jakarta Sel...

Sesi-sesi

I - Platform Open Government Partnership Indonesia
13.00-13.50 WIB

II - Kondisi terkini ekosistem civic tech dan keterbukaan data pemilu
13.50-15.05 WIB

III - Strategi dan Rencana Aksi Keterbukaan Data Pemilu
15.15-16,15 WIB

Unmute Start Video Participants (10) Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Yanuar Nugroho

Mengapa penting memastikan adanya keterbukaan dalam pemilu?

Karena apapun yang muncul dari hasil pemilu akan mempengaruhi hidup warga lebih dari 5 tahun.

Birokrasi terdiri dari 2 bagian:

1. Birokrasi sebagai bagian mesin pemerintahan
2. Elected officials

Keterbukaan menjadi sangat penting tidak hanya menentukan siapa yang menang pemilu, tidak hanya sekedar data pemilu, tetapi juga program kerja.

Zoom Meeting | You are viewing Yanuar Nugroho's screen | View Options | Talking Yanuar Nugroho

Bagaimana OGP dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu?

- Platform OGP dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemilihan Umum melalui disusunnya Rencana Aksi Nasional. Dalam Rencana Aksi Nasional yang disusun secara Bersama (kokreasi) antara masyarakat sipil dengan pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi, mengawasi, serta mengimplementasikan secara langsung dan bersama-sama mengenai aksi seputar transparansi dan akuntabilitas pemilu.
- Dari pihak OGP sendiri juga turut melakukan pengawasan terkait dengan implementasi Rencana Aksi, melalui kehadiran tim Independent Report Monitoring yang akan memperdalam dan mempelajari terkait aksi keterbukaan pemerintah yang telah disusun oleh masyarakat sipil dan pemerintah negara anggota OGP.
- Di Indonesia, Penyusunan Rencana Aksi Nasional juga turut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang juga dapat memastikan kesiapan dan kesediaan rencana kerja k/l terkait dengan program yang diusulkan, termasuk terkait transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Zoom Meeting | You are viewing Yanuar Nugroho's screen | View Options | Leave

Penyusunan RAN harus tajam, disusun secara bersama (kokreasi masyarakat sipil dengan pemerintah). Presiden telah menegaskan pemilu harus berjalan dengan baik.

Zoom Meeting | You are viewing Yanuar Nugroho's screen | View Options | Talking Yanuar Nugroho

‘Insentif’ yang dapat diberikan melalui platform OGP

- Meaningfull participation dalam pelaksanaan rencana aksi nasional: Masyarakat sipil dapat terlibat secara langsung mulai penyusunan hingga implementasi rencana aksi nasional. Selain itu, di Indonesia terkait dengan meaningfull participation ini juga dikawal melalui Monitoring dan Evaluasi dari Sekretariat OGI, sebagai bentuk penilaian dari proses kokreasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil
- Support Mitra Pembangunan: Melalui platform OGP, masyarakat sipil maupun pemerintah akan bertemu dengan berbagai stakeholders yang mendorong keterbukaan pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga OGP merupakan platform strategis untuk saling belajar berbagai praktik baik (salah satunya pemilu) dari berbagai negara lainnya

Zoom Meeting | You are viewing Yanuar Nugroho's screen | View Options | Leave

Refleksi dan saran dari pelaksanaan rencana aksi nasional 2020-2022

- Meningkatkan semangat serta inisiatif kokreasi antara K/L maupun CSO: karena telah tersusun kesepakatan antara K/L dan CSO dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional, K/L dan CSO dapat melakukan kokreasi yang lebih cair dan fleksibel. Koordinasi jalur non-formal dapat segera dibangun sebagai jalan untuk memastikan implementasi rencana aksi nasional.
- Mendorong Keterbukaan K/L terkait (dalam hal ini KPU) berkomitmen dalam memastikan partisipasi masyarakat sipil. Setelah nanti dokumen rencana aksi nasional disepakati antara K/L dan CSO, K/L diharapkan dapat memastikan kehadiran masyarakat sipil dalam aksi yang disepakatinya. Pelibatan masyarakat sipil ini tentu akan membantu K/L untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi K/L dalam birokrasi, yang bisa diselesaikan melalui inovasi masyarakat sipil.

Contoh praktik nyata yang pernah dilakukan karena adanya kokreasi adalah **kehadiran platform API Pemilu**. Perludem dan KPU mendapatkan penghargaan melalui aplikasi API Pemilu yang dikembangkan bersama untuk memastikan data dapat dibagipakaikan melalui pembangunan API yang dikembangkan dan dikelola oleh Perludem melalui support dari KPU.



Kokreasi akan membantu KPU lebih inovatif, keterbukaan tidak hanya keterbukaan data pemilu, tetapi partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Bagaimana kita tidak kehilangan gambar besar, Pemilu 2024 mesti terselenggara dengan baik, demokratis, terbuka dan terselenggara dengan penuh dignity sebagai bangsa. Secara substansi, kita harus menunjukkan keterbukaan dalam pemilu dapat dicapai, fruitful dan meaningful dan menghasilkan outcome pemilu yang lebih berkualitas, prosesnya adil dan jujur.

Maharddhika

Berkaitan dengan rencana aksi keterbukaan data pemilu, tidak masuk dalam list prioritas. Bagaimana agar rencana aksi yang kita susun dapat lebih impactful. Salah satu challenge keterbukaan data pemilu adalah sustainability rencana aksi ketika penyelenggara pemilu berganti.

Yanuar Nugroho

1. Tentu perlu ada mekanisme agar yang kita kerjakan berdampak, perlu ada kesepakatan.
2. Sebagaimana meaningful keterbukaan data itu. Yang dikerjakan kemarin tentang API Pemilu, data bisa dibagipakai, masyarakat sipil dapat menggunakan data itu. Warga akan semakin percaya bahwa pemilu makin bermutu, makin berkualitas. At least yang sudah dilakukan 2019, jangan mundur dari itu. Kita tahu persis RENAKSI ini sangat impactful.

Sustainability RENAKSI tergantung pada komitmen pimpinan. Kadang-kadang ketika leadership berganti, new leadership sering berpikir apa yang dilakukan pendahulunya tidak cocok sehingga

dinihilkan dan mulai lagi. Dalam RENAKSI yang dibat ini masih dalam rentang waktu dalam tangan kita. Kalau ada hal-hal positif yang sudah dicapai, kita teruskan. Pasti akan ada kritik, tidak semua mensupport. Hanya pohon mangga yang berbuah yang dilempari batu, jadi jangan takut menerima kritik.

Hadar Nafis Gumay

Data-data sering tidak ada di penyelenggara, tetapi di badan perwakilan rakyat. Data absensi anggota DPR tidak dibuka, bagaimana data hasil rapat mereka? Banyak data yang penting bagi warga, agar mereka dapat memilih lebih baik. Bagaimana keterbukaan data di lembaga perwakilan rakyat?

Maharddhika

Rencana aksi mendorong keterbukaan keuangan partai politik.

Yanuar Nugroho

Data tersebar di banyak K/L. Dengan Satu Data Indonesia, apakah K/L sdah siap dengan API, sehingga dapat terjadi pertukaran. Perlu upaya merangkul Open Parliament untuk membuka data agar datanya bisa diakses publik. Kalau ada semacam platform di KPU di mana publik dapat mengakses semuanya akan baik sekali, misalnya capres ini didukung partai apa saja, bagaimana keuangannya, mereka mendukung/tidak mendukung undang-undang ini. Kita mlai bertahap, data apa yang dapat dibuka. Penyusunan RENAKSI ini harus ambisius dan fokus apa yang akan kita raih. Kita ukur yang kita punya apa.

Maharani Wibowo (Bappenas)



Recording You are viewing Maharesi Wibisono's screen View Options

Taling: Perhadem - Jakarta Sela...

Daftar Isi

- 1 Sekilas Tentang Open Government Partnership
- 2 Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia
- 3 Perkembangan Aksi Keterbukaan Pemilu

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Recording You are viewing Maharesi Wibisono's screen View Options

Taling: Perhadem - Jakarta Sela...

Open Government Partnership (OGP)

- Open Government Partnership adalah inisiatif multilateral dimana para pemimpin pemerintah dan aktivis organisasi masyarakat mengembangkan rencana aksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **transparan, partisipatif, inklusif, inovatif, dan akuntabel**.
- Indonesia dan 7 negara telah **menginisiasi OGP**, yakni Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina.
- Memasuki tahun 2022, **77 negara** dan **106 pemerintah daerah** telah menjadi anggota, **300 rencana aksi** dan lebih dari **3.200 komitmen** telah disusun.

Open Government Partnership Country Initiator

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Latar Belakang Open Government Indonesia (OGI)



Asian Pacific Leaders Forum 2017



G20 Development Working Group Side Event, 2022



Multistakeholder Forum V Tahun 2022

Apa itu OGI?

OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik Open Government Partnership (OGP), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menghasilkan ide, inisiatif, dan keterbukaan, praktik pemerintah yang dapat mempercepat pencapaian target dan prioritas nasional.

Tujuan OGI

Mempromosikan nilai-nilai **transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif** untuk memperkuat administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Sekretariat Nasional OGI

Dibentuk untuk memfasilitasi pencapaian RAN OGI dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengkonsolidasikan gerakan keterbukaan lainnya, baik yang di tingkat nasional maupun daerah.



Recording interface with navigation icons: Unmute, Start Video, Participants (11), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Leave.

Perjalanan Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia



Recording interface with navigation icons: Unmute, Start Video, Participants (17), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Leave.

Recording

Taling: Peridem - Jakarta Sela...

Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

7

Recording

You are viewing Mahard Wibowo's screen

View Options

Taling: Peridem - Jakarta Sela...

Proses Ko-kreasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VI (2020-2022)

 18 Komitmen	 106 Rapat Pembahasan	 27 Organisasi Masyarakat Sipil	 32 Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
--	---	---	---

 **53%**
Peserta yang Terlibat adalah Perempuan

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

9

Unmute Start Video Participants 12 Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave



Keterbkaan data Pemilu mask dalam rang kewargaan dan demokrasi

Perjalanan Rencana Aksi Keterbukaan Data Pemilihan Umum



3rd Open Government Partnership Awards, 2016



- Dalam *3rd Open Government Partnership Awards 2016 (Paris)*, Perludem memperoleh penghargaan sebagai juara kedua melalui hasil Ko-kreasi dengan KPU dengan membangun *Application Programming Interface (API) Pemilu*.
- **API Pemilu** merupakan media untuk meramu dan menyajikan data dan informasi terkait dengan Pemilu melalui proses digitalisasi data (Perludem: 2015)



- Proses Ko-kreasi KPU-Perludem dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia (RAN OGI) terlibat pada:
- RAN OGI V 2018-2020: **Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada**
 - RAN OGI VI 2020-2022: **Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu**



Unmute Start Video

Participants 17

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

13 Leave

Perkembangan Visualisasi Data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (SIREKAP)

Penerapan Teknologi dalam Pemilu



Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

SIREKAP merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan hasil rekapitulasi suara

Manfaat: **memengkas waktu rekapitulasi suara** yang bisa mencapai **14 Hari**

Tantangan Pengembangan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

1. **Kesulitan mengakses aplikasi oleh KPPS**: pengembangan aplikasi yang belum matang
2. **Portal publikasi rekapitulasi belum realtime**: Portal belum bisa diakses secara langsung ketika rekapitulasi.
3. **Visualisasi dan Penyajian data SIREKAP** dalam format Open Data

Sumber: *Handbook for Democracy and Electoral Integrity (2021)*, *Perludem (2021)*

Catatan Pelaksanaan Implementasi RAN OGI VI

Komisi Pemilihan Umum telah mengadakan Uji Coba SIREKAP. Namun pelaksanaan Uji Coba belum meliputi sampai dengan rangkaian penyajian data SIREKAP



Unmute Start Video

Participants 11

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

14 Leave

Portal Pusat Publikasi Penyelenggaraan Pemilu (OPEN DATA KPU)



www.opendataku.go.id



Daftar Topik dalam Open Data KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan portal **Open Data KPU** sebagai bentuk keterbukaan informasi / data terkait penyelenggaraan Pemilu

Kondisi Terkini:

- Informasi yang tersedia terdiri dari: **10 Topik, 155 Dataset, dan 342 Filedata**

Catatan Pelaksanaan:

- Dataset yang tersedia **belum seluruhnya disajikan dalam format Open Data.**
- Masukan Perludem terkait dengan ketersediaan jenis data, belum sepenuhnya dipenuhi oleh KPU.
- **Belum terintegrasinya** seluruh data dalam sistem informasi KPU lainnya ke dalam portal Open Data KPU

Tantangan Pelaksanaan:

- **Keterbatasan tenaga pengelola** data pada Pusdatin KPU (berdasarkan hasil rapat koordinasi)
- **Standar Operasional Prosedur** terkait pembaharuan informasi dalam portal open data belum disepakati.
- **Prioritas dan arah kebijakan KPU** yang fokus pada persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilu



OPEN GOVERNMENT SYSTEM

Recording

You are viewing Mahamed Whidoni's screen

View Options

Talking: Perudem - Jakarta Sela...

15

Unmute

Start Video

Participants

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

Leave

Portal Pusat Publikasi Penyelenggaraan Pemilu (OPEN DATA KPU)



www.opendataku.go.id



Daftar Topik dalam Open Data KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan portal **Open Data KPU** sebagai bentuk keterbukaan informasi / data terkait penyelenggaraan Pemilu

Kondisi Terkini:

- Informasi yang tersedia terdiri dari: **10 Topik, 155 Dataset, dan 342 Filedata**

Catatan Pelaksanaan:

- Dataset yang tersedia **belum seluruhnya disajikan dalam format Open Data.**
- Masukan Perludem terkait dengan ketersediaan jenis data, belum sepenuhnya dipenuhi oleh KPU.
- **Belum terintegrasinya** seluruh data dalam sistem informasi KPU lainnya ke dalam portal Open Data KPU

Tantangan Pelaksanaan:

- **Keterbatasan tenaga pengelola** data pada Pusdatin KPU (berdasarkan hasil rapat koordinasi)
- **Standar Operasional Prosedur** terkait pembaharuan informasi dalam portal open data belum disepakati.
- **Prioritas dan arah kebijakan KPU** yang fokus pada persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilu



OPEN GOVERNMENT SYSTEM

Recording

You are viewing Mahamed Whidoni's screen

View Options

Talking: Perudem - Jakarta Sela...

15

Unmute

Start Video

Participants

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

Leave

Evaluasi Pelaksanaan dan Perbaikan Ke Depan

Penajaman Prioritas K/L	Keterkaitan antar Platform	Ko-kreasi Aktif	Knowledge Management Berkelanjutan	Komitmen Kepemimpinan
<ul style="list-style-type: none"> Persiapan tahapan Pemilu merupakan Prioritas Nasional. Ekosistem data Pemilu juga perlu disiapkan sebagai <i>enabler environment</i> 	<p>RAN OGI tidak berdiri sendiri. Untuk mengakselerasi dan menciptakan nilai tambah atas komitmen, maka diperlukan keterkaitan antar platform (RAN OGI, RAN SDGs, SDI, RKP, dsb)</p>	<p>Perlu peran aktif Pemerintah dan OMS untuk menciptakan iklim ko-kreasi yang positif.</p>	<p>Memastikan adanya proses berbagi ilmu pengetahuan antar pegawai KPU, sehingga rotasi pegawai tidak menjadi faktor penghambat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengarusutamakan keterbukaan data di lingkungan KPU Melakukan koordinasi, komunikasi tingkat pimpinan, dan tingkat teknis sebagai bentuk komitmen menjaga pelaksanaan Rencana Aksi Nasional OGI

Maharddhika

Perludem memaskkan proposal mengenai keterbkaan data pemilu. Kami berharap tidak hanya SIREKAP saja.

Sesi II

Kondisi terkini ekosistem civic tech dan keterbukaan data pemilu
13.50- 15.05 WIB

Recording You are viewing Dharma's screen View Options Talking

Pertanyaan Kunci

- Bagaimana kondisi ekosistem civic tech dan kesiapan data pemilu terbuka di Indonesia saat ini?
- Melihat perkembangan keterbukaan data pemilu hingga saat ini, apa refleksi dan saran Anda untuk pengembangan lebih lanjut inisiatif keterbukaan data pemilu menuju Pemilu dan Pilkada 2024?

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions App Leave

Perludem dengan TII melakukan joint research mengenai ekosistem civic tech dan keterbukaan data pemilu yang disupport Program Respect. Kami melakukan pendekatan ekosistem.

Arifianto (TII)

Recording You are viewing Dharma's screen View Options Talking

USAID
INDONESIA
ELECTION COMMISSION

Enabling Civic Tech Ecosystems and Open Election Data Readiness to Improve the Integrity of Elections in Indonesia

in collaboration with

USAID
INDONESIA
ELECTION COMMISSION

Enabling Civic Tech Ecosystems and Open Election Data Readiness to Improve the Integrity of Elections in Indonesia

Sponsored by

INDONESIA
ELECTION COMMISSION

The Research's main purpose is to support the Indonesian People through the Open Data Access to Government Information (ODAG) program in Indonesia. It is a part of the ODAG program and is being implemented in partnership with the Indonesian Election Commission.

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions App Leave

Banyak sekali tantangan ketika melakukan riset ekosistem dan keterbukaan data pemilu.



Personil di KPU daerah memerlukan peningkatan kapasitas, sering terjadi pergantian orang. Bagaimana mendorong peningkatan permintaan data dari publik. Infrastruktur menjadi PR besar, butuh dukungan KPU, Pemerintah dan DPR. Harus ada komitmen bersama dan dorongan dari masyarakat sipil bagaimana ini dapat terus berlanjut.

Hadar Nafis Gumay

Kami dulu semaksimal mungkin mengupayakan keterbukaan data pemilu, masyarakat sipil punya inisiatif, dan kami terbantu. Tenaga yang tersedia di KPU perlu ditingkatkan. Yang sekarang ada data Sirekap, mau dibawa ke mana juga tidak tahu. Mereka dipilih menjelang tahapan pemilu, kalau perlu dalam seleksi anggota KPU harus masuk kriteria punya perspektif afirmasi perempuan. Persoalan dan cara pandang mereka bisa berbeda-beda. Kalau punya pemahaman data yang dibuka bisa membantu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu sendiri. Mereka tidak punya orang untuk mengerjakan. Perlu dipilah mana yang menjadi prioritas tersedia dalam pemilu 2024. Yang sekarang diperlukan background calon yang seharusnya data itu dipunyai KPU. Seharusnya tujuan teknologi bukan hanya membantu bekerja tetapi juga memudahkan penyajian data, karena semuanya sudah digital.

Maharddhika

Kerangka waktu menyebabkan penyelenggara pemilu lebih memprioritaskan tahapan pemilu.

Aji (JPPR)

Pengalaman JPPR dalam pemantauan pemilu terkait data yang disediakan KPU, pada proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, akses informasi partai politik tidak tersedia. Kita tidak dapat melihat data yang diberikan parpol. Dalam sosialisasi KPU, katanya akan ada mirroring data Sipol di Infopemilu, tetapi ternyata belum ada. Pada verifikasi faktual, keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan tidak diatur. Apa yang ada di KPU, fokus penyelenggara pemilu masih pada tahapan. Tenaga IT dan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota masih sangat minim. Seharusnya ada DPT di kabupaten/kota, kenyataannya data-data tersebut belum disajikan. Mereka mungkin datanya ada, tetapi tenaga IT tidak ada, sehingga data tidak dipublikasikan.

Maharddhika

Yang dibuka hanya untuk mengecek NIK.

Hadar Nafis Gumay

Kita jadi khawatir, partai yang tidak lolos, tetapi lolos, dokumen seharusnya masuk di dalam SIPOL.

Sahel

Mungkin saya mulai dari proposal usulan TI, karena kita selama ini fokus pada keuangan partai politik, maka kami mendorong keterbukaan data keuangan partai politik. Kita mendorong KPU, tetapi anggota KPU Idham Kholik mengatakan, fokus KPU terbatas pada dana kampanye. Minim progresivitas dari KPU sekarang. Jangan-jangan kita tunggu Bjorka yang membongkar semua ini.

Maharddhika

Data SIDAKAM didorong agar open data.

Rahma Utami (Suarise)

Concern yang saya ajukan keterbukaan data untuk disabilitas. Tantangan utama keterbukaan informasi tentang partai politik dan kandidat. Sosialisasi lebih sering difokuskan cara nyoblos, tapi belum sampai ke edukasi tentang parpol dan caleg. Disabilitas ada kendala mobilitas. Bisa dengan cara digital, tetapi harus ada aksesibilitas digital. Standarnya sudah ada sejak 1998. Disabilitas sangat rentan dan ada kemungkinan diarahkan. Belum ada standarisasi publikasi, semoga bisa dikejar untuk Pemilu 2024.

Maharddhika

Salah satu poin penting kita mendorong open data, data bisa dibaca sama mesin.

Izza

Tadi banyak disampaikan, open data yang disediakan KPU, tujuannya ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi masih banyak permasalahan sehingga membatasi masyarakat untuk berpartisipasi. Ketika masyarakat umum ingin melihat apakah parpol memiliki visi misi yang sesuai, di situ masyarakat merasa terbatas. Bagaimana KPU menggandeng masyarakat sipil menerjemahkan data ini menjadi informasi yang bisa dipahami masyarakat umum.

Anwar

Tantangan open data di pemilu, kami banyak memantau dari proses pengambilan kebijakan di KPU, melihat bahwa ada persoalan di soal independensi pengambilan kebijakan di tingkat komisioner sehingga menjadi tantangan berat ketika tahapan pemilu. Apakah karena timing yang kurang tepat, tapi kemudian kami mengamati SIPOL, sangat tertutup. Sedikit-sedikit KPU berkonsultasi ke Komisi II, hal ini membuka ruang intervensi terhadap independensi. Kalau timingnya tepat, tidak akan terganggu dengan intervensi parpol di DPR. Saya sepakat kekuatan masyarakat sipil akan berpengaruh pada kekuatan di DPR.

Arif Adiputro

IPC waktu pemilu 2019 form caleg tidak ada perubahan signifikan, formulir hanya formalitas dan tidak dipublikasikan ke publik. Publik tidak tahu komitmennya.

Kita sudah memberikan masukan ke KPU apa saja yang perlu dipublikasikan, agar pemilih tidak asal memilih. Formulir caleg supaya menjadi bahan masyarakat untuk memilih dan datanya dibuka ke publik.

Terkait Sipol, keadaannya seperti itu, banyak data pribadi orang yang digunakan. Perlu ada transparansi.

Parpol sebenarnya lembaga yang perlu ada insentif, apa insentif politik ketika mereka membuka data, rewardnya apa? Agar partai politik punya komitmen untuk membuka data, insentif politik apa yang bisa mereka dapatkan?

Maharddhika

Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak kolaborasi, hasil pemilu semakin banyak yang diterima publik.

Pengelola data di KPU belum dibentuk, aksesibilitas data jangan sampai mengenyampingkan teman-teman rentan.

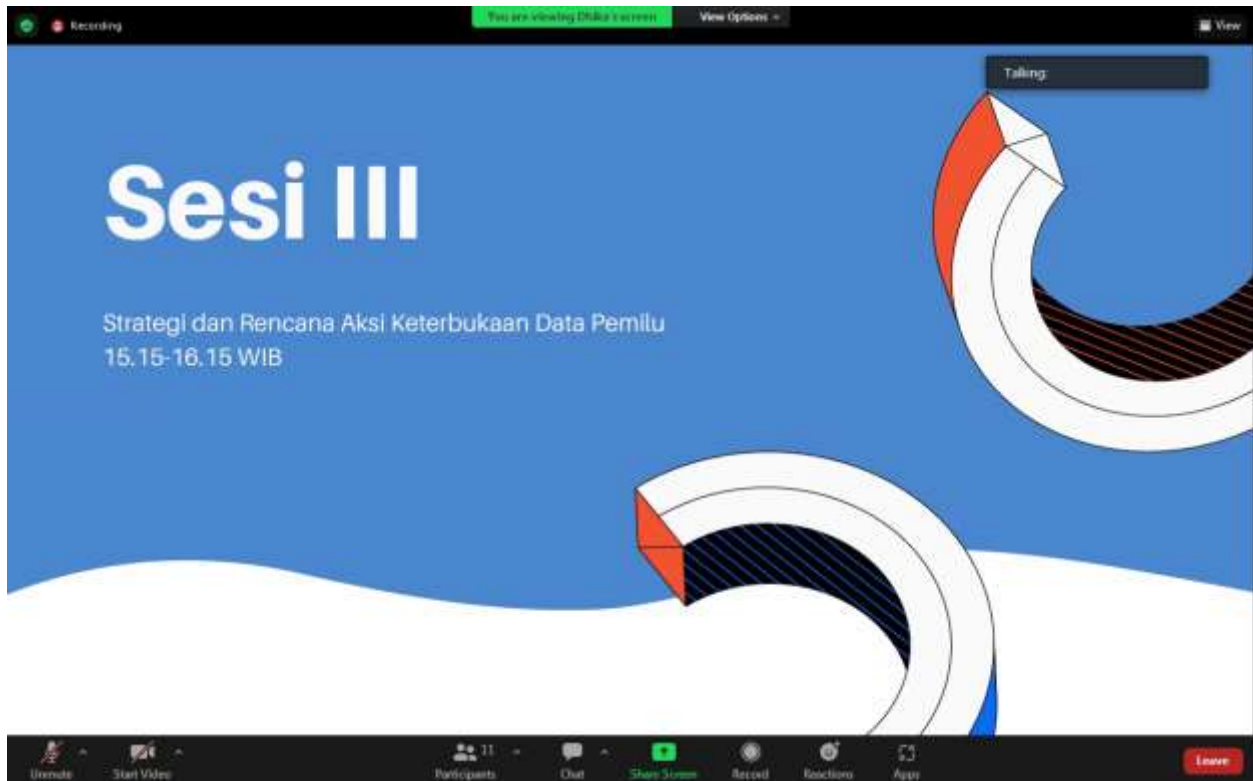
Titi Anggraini

Pendekatan ekosistem, Indonesia tidak mudah karena mengelola data yang sangat besar. Berkaitan dengan data, penyelenggara pemilu bukan hanya KPU, tetapi ada Bawaslu dan DKPP. Ada 380 putusan pengadilan untuk pidana pemilu, perlu terkonsolidasi ketersediaan datanya. Kita belum terlalu banyak memberikan atensi kepada data-data di sana. Data penegakan hukum menarik sekali jika menjadi salah satu fokus open data.


Keberlanjutan: problem struktural kelembagaan, ketika terjadi pergantian kepemimpinan, data hilang.

Adanya problem diseminasi data.

Maharddhika



Recording You are viewing Dika's screen View Options Telling



Pertanyaan Kunci (III)


- Apa saja data pemilu yang harus tersedia untuk Pemilu dan Pilkada 2024?
- Apa rencana KPU dan Bawaslu dalam menyediakan data pemilu terbuka untuk Pemilu dan Pilkada 2024?
- Bagaimana strategi kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dengan OMS dalam penyediaan data terbuka Pemilu dan Pilkada 2024?
- Bagaimana Renaksi Keterbukaan Pemerintah 2023-2024 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat inisiatif ini?

Unmute Start Video Participants 10 Chat Show Screen Record Reactions Apps Leave

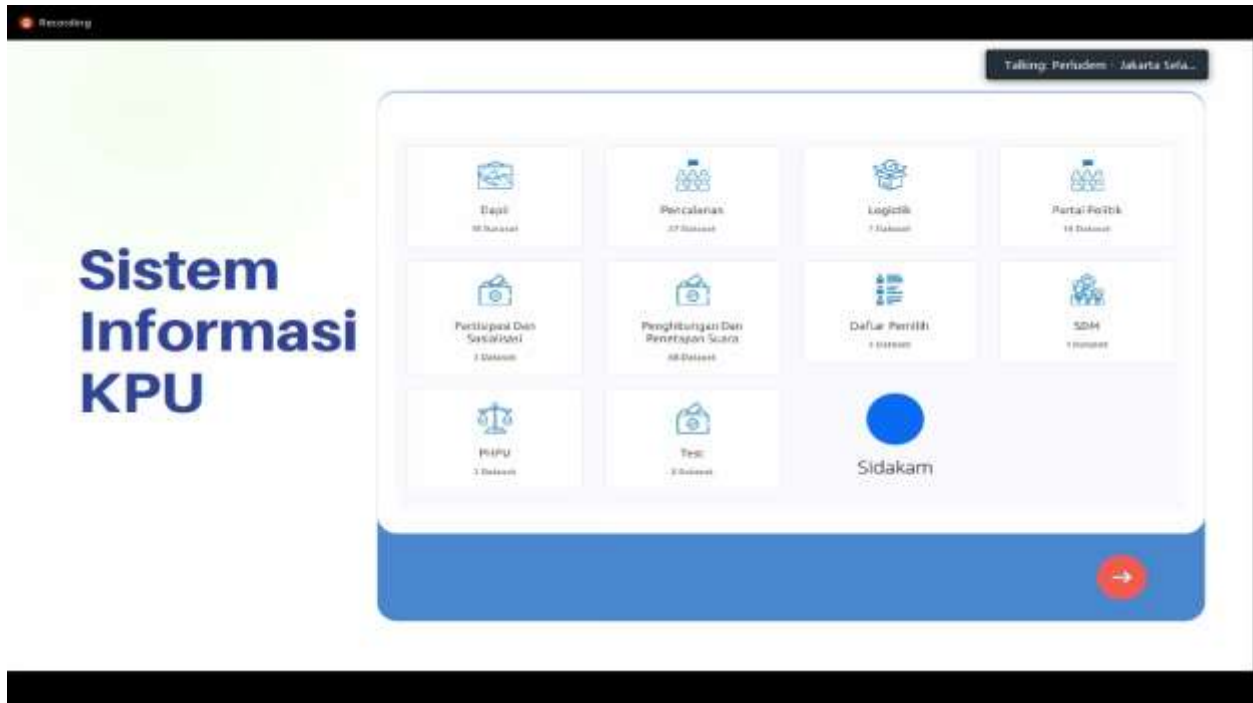
Recording You are viewing Dika's screen View Options Telling

Kategori Kunci Data Pemilu

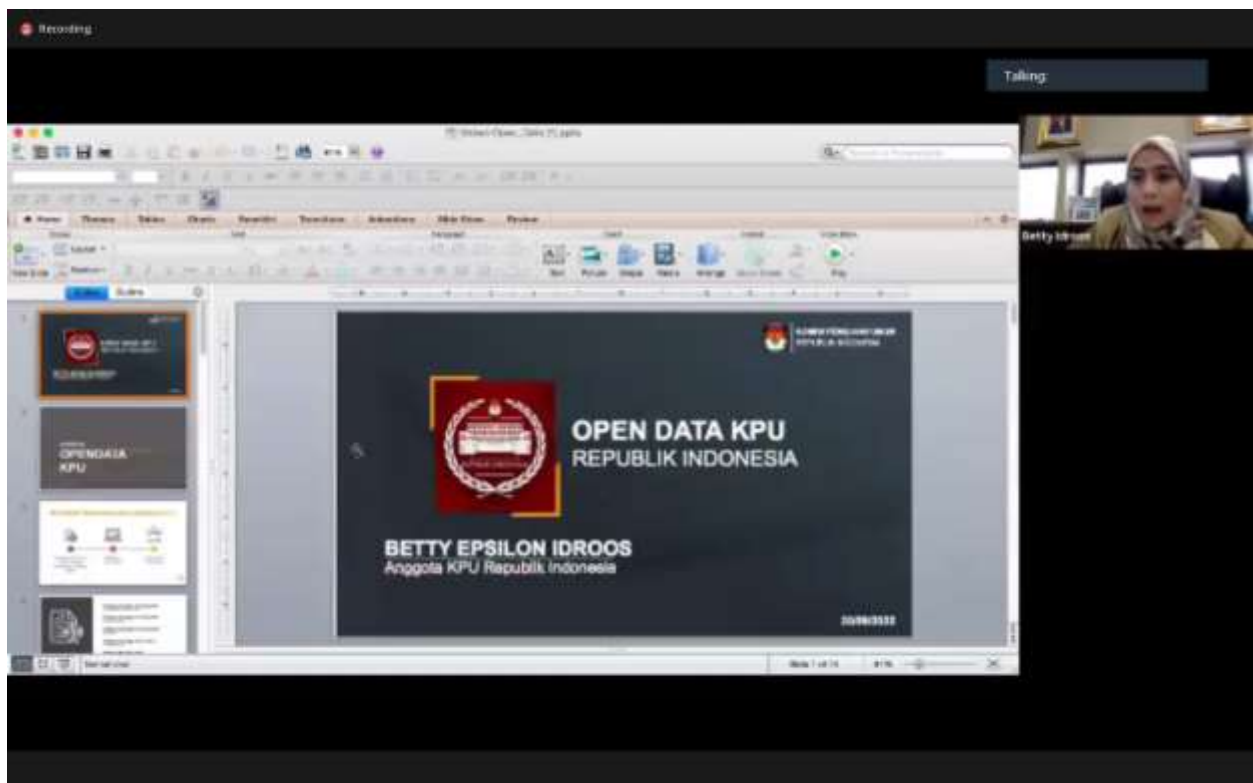
16 kategori kunci data pemilu
Disarikan dari Open Election Data Initiative, National Democratic Institute (2015)



Unmute Start Video Participants 10 Chat Show Screen Record Reactions Apps Leave



Betty Idroos (KPU RI)



Recording ▶ You are viewing Mardiana's screen View Options View

Talking

ROADMAP TRANSPARANSI INFORMASI KPU

- 1 Penerapan Peraturan hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Digitalisasi Data Pemilu
- 3 Implementasi Open Data

10 Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Recording ▶ You are viewing Mardiana's screen View Options View

Talking

Dasar Hukum

- Undang-Undang 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
- Undang-Undang 43 Tahun 2009 Kearsifan
- Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum
- Perpres 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Perpres 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia

10 Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Recording | You are viewing Mardiana's screen | View Options | Taling

Data Terbuka

Data | Tipe | Visualisasi | Logout

Data Terbuka,

Dataset Terbaru

Calon Anggota Legislatif (Calon DPRD Kabupaten/Kota Pemilih Tahun 2019 untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur)

Calon Anggota Legislatif (Calon DPRD Kabupaten/Kota Pemilih Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi 1 (Provinsi Sulawesi Utara,

10 Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Recording | You are viewing Mardiana's screen | View Options | Taling

OPENDATA KDU

Data | Tipe | Visualisasi | Cari | Logout

Tipe data yang tersedia

- Daftar Pemilih
- DPRD
- Partisipasi Dan Transparansi
- PDRD
- Pengikutan Dan Pemetaan Kota
- BSP
- Perencanaan
- Lupatik
- Korupsi

10 Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Recording | You are viewing Mardiana's screen | View Options | Talking | View

MENU DATASET

Berisi list semua dataset yang dapat dilakukan pencarian berdasarkan topik atau tags.

Dataset yang ada di Open Data KPU

1. DPT Pemilu 2019 Per Kabupaten/Kota
2. Situng 2019 (Hasil Penghitungan) Rekap Per Kecamatan dan Dapil :
 - DPR RI
 - DPR Prov
 - DPRD Kab/Kota
 - DPD RI
3. SIPOL 2019
 - Data Kepengurusan dan Anggota

Bottom bar: Upload, Start Video, Participants (10), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Leave

Recording | You are viewing Mardiana's screen | View Options | Talking | View

Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2...

Dalam sebuah dataset terdapat:

- Judul
- Deskripsi
- Sumber data
- Pratinjau
- Informasi tambahan

Format Data

- csv
- excel

Bottom bar: Upload, Start Video, Participants (10), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Leave

Recording

Talking

OPENDATA KPU

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Per Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019

API Documentation

Support

SQL Query

API Documentation

KPU akan memberikan akses API pada Open Data KPU

Recording

Talking

OPENDATA KPU

Visualisasi

HASIL RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPTH-3 PEMILU 2019

21 Mei 2019

DPTH-3 Dalam Negeri

PKS	809.531	79% (95%)
PKS	628	100%
Total	190.779.466	95.365.946 (45,99%)

DPTH-3 Luar Negeri

PKS	702	100%
PKS	2.061	100%
PKS	414	100%
Total	1.991.145	1.125.445 (56,52%)

Menu Visualisasi berisi infografis data pemilihan

Recording

You are viewing MasDewi's screen

View Options

Talking

Perbandingan Data

JUMLAH TPS Berdasarkan SK	
TPS	JUMLAH
Dalam Negeri	809.531
Luar Negeri	3.177
Total	812.708

JUMLAH TPS Berdasarkan Situng	768.304
SELISIH	44.404 5,46%

DISCLAIMER

Perbedaan data TPS pada SK dan TPS pada Situng dikarenakan tidak semua satker mengunggah hasil penghitungan di TPS ke dalam Situng.

10

Urute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Recording

Talking

Kebutuhan Penyediaan Data

```

graph LR
    subgraph Offices
        A[BIRO SDM]
        B[BIRO PARTISIPASI & HUB. MASYARAKAT]
        C[BIRO LOGISTIK]
        D[BIRO ADVOKASI HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA]
    end
    subgraph DataNeeds
        E[Rekap data pegawai KPU per Kabupaten/Kota]
        F[Rekap data Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019]
        G[Rekap data kebutuhan logistik Pemilu 2019]
        H[Rekap Data PHPU]
    end
    I[OPEN DATA KPU]
    A --> E
    B --> F
    C --> G
    D --> H
    E --> I
    F --> I
    G --> I
    H --> I
  
```

BIRO SDM

BIRO PARTISIPASI & HUB. MASYARAKAT

BIRO LOGISTIK

BIRO ADVOKASI HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA

Rekap data pegawai KPU per Kabupaten/Kota

Rekap data Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019

Rekap data kebutuhan logistik Pemilu 2019

Rekap Data PHPU

OPEN DATA KPU

Maharddhika

Ada komitmen KPU untuk membuka data pemilu.

Agus (Staf Bawaslu)

Kondisi yang dilihat di Pusdatin Bawaslu. Pusdatin Bawaslu belum genap 2 tahun, dan karena banyak hal terkait teknologi informasi yang harus dibenahi, data menjadi masalah bersama. Pusdatin Bawaslu hasil merger 2 bagian, sub-bagian data dan informasi dan sub-bagian dokumentasi dan publikasi. Dengan kondisi seperti itu, Pusdatin harus mengurus TIK di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kita berpatokan pada SPBE, standar yang diberlakukan di lembaga negara. Di dalam SPBE ada 4 domain yang harus disiapkan data dukungnya:

1. Dokumen Kebijakan, biasanya layanan mendahului kebijakan.
2. Dokumen Tata Kelola
3. Manajemen
4. Layanan

Bawaslu ada layanan penanganan pelanggaran, yang sekarang sedang dibahas Perbawaslunya, sengketa proses pemilu, pencegahan pelanggaran. Harus memiliki layanan yang berbasis elektronik. Muara dari semua layanan adalah data. Bawaslu sudah mengembangkan sistem open data Bawaslu, namun karena ketiadaan staf, belum maksimal penggunaannya. Tahun ini Bawaslu mengembangkan layanan berintegrasi. Dari hasil agregasi data, Bawaslu akan membuat sistem pendukung layanan pemerintah terpusat. Diharapkan 2024 sudah bisa running. Pusdatin sudah menyiapkan infrastrukturnya.

Sahel

Sejauh ini TI masih terus melakukan pendekatan ke beberapa stakeholder, Kemendagri, Kemenkopolhukam. Di TI juga ada inisiatif menciptakan platform menampung laporan keuangan parpol. Kalau ke KPU sebenarnya dorongan kita kemarin adalah soal laporan keuangan menjadi syarat peserta pemilu, tetapi KPU tidak akan menyentuh keuangan partai politik, hanya fokus ke dana kampanye.

Maharddhika

Menyamakan persepsi dengan KPU dan Bawaslu, karena salah satu tantangan adalah belum ada prioritas dari KPU dan Bawaslu.

Hadar Nafis Gumay

Penting untuk membuat rencana ini spesifik. Saya usul agar data-data di KPU ada sistem-sistem sendiri, kita kumpulkan pandangan kita mengenai sistem-sistem ini. Penting data-data tentang partai politik, data program parpol, SIPOL yang sekarang berlangsung perlu didorong, kita cari cara supaya data itu bisa terbuka. Silon juga penting, di ujung Sirekap, sistem yang akan

mengumpulkan dengan cepat hasil pemilu setiap TPS, bisa diakses foto dan data digitalnya. Di masing-masing sistem, data yang terkumpul ada yang harus dibuktikan dengan foto/scan, nanti dipilah data dari form apa yang dibuka. Saya usulkan kita bicara sampai detail.

Rahma Utami

Yang dibutuhkan partisipasi publik evaluasi apa saja yang belum akses, apa yang bermasalah. Sedang dikembangkan pelaporan untuk disabilitas. Sedang dipikirkan monitoring masyarakat mengenai informasi yang direquest. Bagaimana menyambungkan aspirasi yang dikumpulkan dalam platform hingga sampai ke pihak terkait.

Maharani Wibowo

Konten bahwa sosialisasi itu perlu. Pendaftaran dan verifikasi parpol ada anggarannya dan besar-besar. Penting pengawalan terhadap Renja KPU.

Anwar

Sebenarnya penting juga Renja KPU kita akses. Saya setuju dengan TI terkait dana keuangan partai. Di tahapan pendaftaran menjadi prasyarat untuk melihat keuangan partai, tetapi itu tidak menjadi prasyarat. Ini menjadi kebutuhan data di publik untuk melihat keuangan partai. Kami pernah melakukan riset dana partai jauh lebih besar daripada dana kampanye, tetapi tidak ketahuan pengelolaannya.

Data calon di Silon, kelengkapan data calon, dapat menyelesaikan masalah disinformasi, sejauh mana dapat dipublikasikan.

Aji

Selain kita menyamakan persepsi, kita juga harus menyamakan tujuan apakah untuk partisipasi atau data yang disajikan. Data-data temuan Bawaslu juga harus dipublikasikan. Rekrutmen penyelenggara pemilu juga banyak di 2023, perlu data rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu. Se jauh ini pengalaman rekrutmen tidak banyak data disajikan timsel dalam proses rekrutmen.

Izza

Kalau dari kami, mengamati laporan dana kampanye. Masalahnya dalam laporan, lampiran yang disampaikan masih formalitas, harapannya dalam open data pemilu, laporan dana kampanye lebih substansial. Di Bawaslu sendiri, adanya temuan juga harus ditampilkan lebih substansial.

Theo (Sekretariat OGI)

Terkait dengan review/pembelajaran, ada kendala koordinasi dalam kokreasi. Kita juga akan membuat prioritas, tidak semua bisa diakomodasi. Dalam diskusi tanggal 22, bisa dieksplor lagi, misalnya sosialisasi untuk disabilitas. Di Pusdatin KPU sudah ditunjuk yang in charge open data.

Arif (IPC)

Ingin menambahkan, soal SILON, kita perlu prioritaskan hal itu, data rekam jejak calon, profil calon, riwayat hidup sulit diakses, visi misi calon. Formatnya perlu diubah. Program kerja caleg perlu diketahui masyarakat.

Beneficial ownership → disampaikan ke KPU, calon berlatar belakang pengusaha harus ditampilkan.

Hadar Nafis Gumay

Rekam jejak dilihat dari mana? Di PKPU ada model form CV seperti yang diharapkan kita. Harus ada sistem yang mengatur ada data yang harus diisi, kalau tidak diisi, tidak bisa disubmit.

Titi Anggraini

Formulir daftar riwayat hidup biasanya dianggap caleg sebagai template yang tidak bisa dimodifikasi. KPU harus menjelaskan mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup. Data yang dikumpulkan bukan sekedar ada, tetapi substansinya bisa dimanfaatkan publik.

Bagaimana kolaborasi KPU dengan CSO → apakah CSO bisa diperluas dengan perguruan tinggi, media? KPU berkolaborasi dengan banyak universitas untuk Sekolah Tata Kelola Pemilu. Kita perlu melihat peluang dari institusi sipil lainnya.

Maharddhika

Data yang diperlukan Sipol, Silon, Sirekap, Sidakam, temuan Bawaslu, data penyelenggara pemilu, sidapil (data kependudukan, data wilayah). Di dalam sistem informasi, field apa yang akan kita minta, misalnya SIPOL: laporan keuangan parpol, Silon: data beneficial ownership, Sirekap: partisipasi terpilah laki dan perempuan. Kita perlu strategi karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada data yang dikecualikan. Ada soal prioritas, tidak hanya data, tetapi apa kegiatan setelah data dibuka, supaya lebih berdampak.

Setelah ini akan ada pertemuan dengan CSO, media, litbang untuk merumuskan apa yang diperlukan dalam data SILON, standar teknologi seperti apa yang bisa memudahkan kerja kita, termasuk aksesibilitas.

Khoirunnisa Nur Agustyati

Kita tidak ingin inisiatif baik yang dulu ada, berhenti, tetapi terus berlanjut, sebagai bentuk kokreasi untuk mendorong meaningful participation, masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

